



PENGUATAN KOMPETENSI AKUNTANSI KEUANGAN DI BLUD PUSKESMAS: IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI DAN PRAKTIK TERBAIK MELALUI PELATIHAN INTENSIF

Einde Evana¹, Widya Rizki Eka Putri², Neny Desriani³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung,

einde.evana@feb.unila.ac.id¹, widya.rizki@feb.unila.ac.id², neny.desriani@feb.unila.ac.id³

Dikumpulkan: 10 September 2024; Diterima: 21 Juli 2025; Terbit/Dicetak: 30 Juli 2025

<https://doi.org/10.23960/begawi.v3i2.53>

Abstract: *The workshop on the preparation of financial reports for the Regional Public Service Agency (BLUD) of the Mesuji Health Office was conducted to improve the understanding and capabilities of financial management personnel in managing public sector finances. Held at the Sheraton Hotel, Bandar Lampung, on September 10, 2024, this workshop aimed to help BLUD staff prepare accurate financial reports following regulatory standards. The workshop provided essential insights into accounting principles specific to BLUDs and practical steps for financial statement preparation. Participants included 50 health department officials, auditors, and accountants who actively engaged in discussions and practical exercises. The success of this workshop was reflected in the increased awareness of compliance and reporting accuracy.*

Keywords: Laporan Keuangan, BLUD, Akuntansi Sektor Publik, Workshop, Dinas Kesehatan Mesuji

Copyright © 2025, BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

*Corresponding author:

Neny Desriani

FEB Universitas Lampung

Email: neny.desriani@feb.unila.ac.id

Abstrak: Workshop penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola keuangan dalam mengelola keuangan sektor publik. Workshop yang berlangsung di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, pada tanggal 10 September 2024 ini bertujuan membantu staf BLUD dalam menyusun laporan keuangan yang akurat sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Workshop ini memberikan wawasan penting mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku khusus untuk BLUD serta langkah-langkah praktis dalam penyusunan laporan keuangan. Peserta yang terdiri dari 50 pejabat dinas kesehatan, auditor, dan akuntan aktif berdiskusi serta mengikuti latihan praktis. Keberhasilan workshop ini tercermin dari peningkatan kesadaran akan kepatuhan serta akurasi dalam pelaporan keuangan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bergerak di bidang kesehatan, seperti halnya Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, satuan kerja di daerah yang berstatus BLUD diharuskan menerapkan praktik akuntansi yang lebih kompleks, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Mesuji adalah latar belakang pendidikan para pengurus administrasi keuangan yang mayoritas tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Sebagian besar pengurus administrasi keuangan BLUD berlatar belakang pendidikan kesehatan atau bidang non-akuntansi lainnya. Meskipun demikian, akuntabilitas keuangan harus tetap dipertahankan untuk memenuhi kewajiban regulasi dan mendukung pengelolaan anggaran serta pelayanan publik yang lebih baik (Harahap & Azizah, 2023).

Kendala pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah dan pelaksanaan teknis penyusunan laporan keuangan seringkali menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pengurus keuangan BLUD di Puskesmas. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program pengabdian masyarakat menyelenggarakan workshop "Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji" yang diadakan di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, pada tanggal 10 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola keuangan BLUD, agar mereka mampu menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tantangan dan Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan BLUD



Kompetensi SDM

Keterbatasan SDM dengan pemahaman akuntansi BLUD yang memadai.



Sistem Informasi

Sistem informasi dan aplikasi keuangan BLUD yang belum optimal.



Regulasi

Peraturan dan pedoman teknis penyusunan laporan BLUD yang masih kurang jelas.



Waktu & Tenaga

Keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyusun laporan keuangan BLUD.

Gambar 1. Slide Materi

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop tatap muka dengan melibatkan narasumber dari akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang akuntansi sektor publik. Peserta berasal dari 14 BLUD Puskesmas di Kabupaten Mesuji, Lampung. Pelatihan terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

Materi Teoritis:

Narasumber menyampaikan pengetahuan dasar mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan BLUD, dan peraturan-peraturan terkait penyusunan laporan keuangan. Peserta diajak untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan, serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (Yuliansyah et al., 2019; Harahap & Azizah, 2023).

Beberapa peraturan yang disampaikan mencakup beberapa peraturan releva berikut:

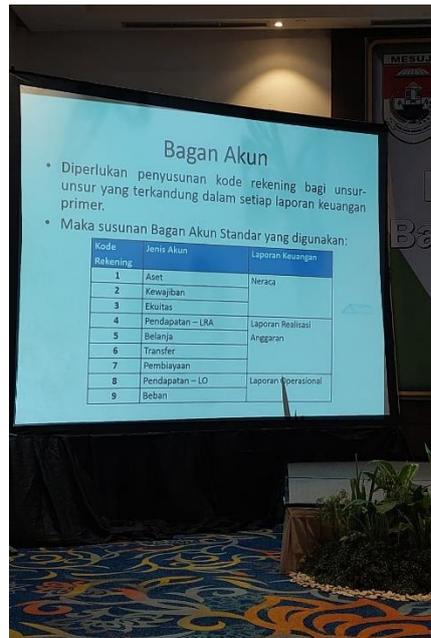
- a. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007**
Peraturan ini menjadi landasan teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD. Narasumber menjelaskan pentingnya mengikuti ketentuan tersebut, yang mencakup standar penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset, dan kewajiban pelaporan akuntansi berbasis akrual. BLUD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional (LO)
 4. Laporan Arus Kas
 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual**
SAP merupakan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah termasuk BLUD. SAP berbasis akrual memungkinkan entitas untuk mengakui pendapatan dan belanja saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Dalam workshop ini, dijelaskan pentingnya memahami dan menerapkan SAP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**
Peraturan ini mengatur penerapan SAP berbasis akrual di instansi pemerintah, termasuk BLUD. Materi ini disampaikan untuk menekankan bagaimana aturan ini harus diterapkan oleh pengelola keuangan BLUD untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar.
- d. **Pengelolaan Dana Kapitasi pada Puskesmas yang Berstatus BLUD**
Pengelolaan dana kapitasi yang diterima puskesmas diatur melalui regulasi yang ketat. Dana kapitasi digunakan untuk mendanai operasional puskesmas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Narasumber menjelaskan bagaimana dana ini harus dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Tantangan Pengelolaan Keuangan di Puskesmas dengan Pengurus Non-Akuntansi

Dalam sesi ini, disoroti bagaimana para pengurus BLUD di puskesmas Kabupaten Mesuji yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Meskipun demikian, penting bagi mereka untuk mematuhi standar yang berlaku dan tetap mempertahankan akuntabilitas keuangan.

Praktik Penyusunan Laporan Keuangan:

Setelah pemaparan materi teoritis, peserta diberikan kesempatan untuk langsung mempraktikkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat memahami pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja BLUD, serta menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.



Gambar 2. Slide Materi di ruangan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3. Panyampaian Materi

Hasil dari kegiatan workshop menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun laporan keuangan BLUD. Beberapa hasil utama yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

Partisipasi Aktif Peserta:

Peserta secara aktif terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab selama pelatihan. Mereka memberikan masukan terkait permasalahan spesifik yang mereka hadapi di lapangan, seperti penyesuaian akrual dan pengelolaan belanja modal. Sesi praktik juga dirancang dengan simulasi penyusunan laporan keuangan yang diterapkan pada studi kasus BLUD di Mesuji.

Peningkatan Keterampilan Teknis:

Peserta secara aktif terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab selama pelatihan. Mereka memberikan masukan terkait permasalahan spesifik yang mereka hadapi di lapangan, seperti penyesuaian akrual dan pengelolaan belanja modal. Sesi praktik juga dirancang dengan simulasi penyusunan laporan keuangan yang diterapkan pada studi kasus BLUD di Mesuji.



Gambar 4. Dokumentasi Peserta kegiatan

KESIMPULAN

Workshop ini memberikan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan teknis peserta terkait penyusunan laporan keuangan BLUD. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan juga dapat meningkat.

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di BLUD, khususnya di Puskesmas Kabupaten Mesuji:

- 1) Peningkatan Pelatihan Berkala: Mengingat latar belakang pendidikan para pengurus BLUD di Kabupaten Mesuji yang umumnya tidak berasal dari fakultas ekonomi atau akuntansi, disarankan untuk mengadakan pelatihan berkala tentang akuntansi publik dan standar akuntansi pemerintahan. Pelatihan ini sebaiknya mencakup pemahaman mendalam mengenai akuntansi berbasis akrual, peraturan terbaru, dan teknik penyusunan laporan keuangan yang efektif.
- 2) Pengembangan Modul Pelatihan Khusus: Untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengelolaan keuangan BLUD, disarankan agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung mengembangkan modul pelatihan yang dirancang khusus untuk BLUD Puskesmas. Modul ini harus mencakup materi praktis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola keuangan BLUD, serta contoh studi kasus yang terkait.
- 3) Penguatan Sistem Pendampingan dan Bimbingan: Direkomendasikan untuk membentuk tim pendamping dari kalangan akademisi dan praktisi akuntansi yang dapat memberikan bimbingan langsung kepada pengelola keuangan BLUD. Sistem pendampingan ini dapat berupa konsultasi rutin dan pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Puskesmas.
- 4) Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan: Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi. Disarankan untuk mengadopsi sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan melatih staf BLUD dalam penggunaannya.
- 5) Evaluasi dan Penilaian Berkala: Melakukan evaluasi dan penilaian berkala terhadap kemampuan pengelola keuangan BLUD dan efektivitas pelatihan yang diberikan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki materi pelatihan dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
- 6) Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan sesuai dengan regulasi dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Mesuji dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan workshop "Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji." Terima kasih khusus kami sampaikan kepada:

1. **Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji**, atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa dalam memfasilitasi kegiatan ini serta partisipasinya dalam pelatihan.
2. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**, terutama kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta tim yang telah bekerja keras dalam perencanaan dan pelaksanaan workshop.
3. **Peserta Workshop**, yang telah menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan, serta memberikan masukan yang sangat berharga.
4. **Semua pihak yang terlibat**, termasuk staf dan relawan yang telah membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan teknis dan logistik.

Tanpa kontribusi dan dukungan dari semua pihak tersebut, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan sukses. Semoga hasil dari workshop ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan keuangan BLUD dan mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Mesuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Said, D. (2018). Analisis praktik penyusunan laporan keuangan BLUD di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 6(1), 101-112. <https://doi.org/10.12345/jamp.v6i1.1234>.
- Dwiatmoko, A., & Harahap, S. (2022). *Akuntansi publik dan pengelolaan BLUD: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fajar, T., & Widiastuti, D. (2020). Evaluasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan BLUD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(1), 55-64. <https://doi.org/10.5678/jkd.v4i1.5678>.
- Harahap, S., & Azizah, N. (2023). Implementasi akuntansi berbasis akrual di BLUD: Studi kasus Puskesmas Kabupaten Mesuji. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 123-132. <https://doi.org/10.9101/jasp.v7i2.9101>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. Jakarta: IAI.
- Mulyana, A., & Suryanto, T. (2020). Pengaruh latar belakang pendidikan non-akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan BLUD Puskesmas. *Jurnal Pendidikan dan Akuntansi*, 9(2), 45-53. <https://doi.org/10.2345/jpad.v9i2.2345>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Suparman, E. (2020). Penerapan akuntansi pemerintahan pada badan layanan umum daerah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(3), 134-142. <https://doi.org/10.3456/jap.v5i3.3456>.
- Suyanto, H. (2021). Pengelolaan dan pelaporan dana kapitasi dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(4), 233-241. <https://doi.org/10.4567/jkm.v5i4.4567>.
- Yusuf, M. A. (2021). Implementasi standar akuntansi berbasis akrual pada BLUD. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 6(2), 89-102. <https://doi.org/10.7890/jap.v6i2.7890>.